

ABSTRAK

Nama: Lisan Nulhasanah. NIM: 2210120006. Sejarah Kebudayaan Islam. Program Magister Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Dewan Kabupaten Garut didirikan pada tahun 1925 sebagai lembaga pemerintahan setempat yang bertanggung jawab dalam mengatur kehidupan masyarakat di wilayah Kabupaten Garut. Pembentukan dewan tersebut juga diikuti dengan perubahan dinamika sosial-politik di tengah masyarakat Garut, terutama kaum pribumi. Di masa itu, kaum pribumi Garut mengalami perubahan sosial-politik yang signifikan akibat berbagai faktor, termasuk pengaruh politik Belanda, perjuangan nasionalisme, dan juga faktor internal dari masyarakat Garut sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan sosial-politik di masyarakat pribumi Garut setelah pembentukan Dewan Kabupaten Garut pada tahun 1925-1942, mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi dinamika sosial-politik, dan mengidentifikasi dampaknya pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian sejarah meliputi tahapan-tahapan: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Teori yang dipakai adalah Teori *Struktural-Fungsional* digunakan untuk menganalisis Dinamika Sosial Politik Kaum Pribumi Dalam *Regentschapsraad* Garut 1925-1942. Hasil penelitian menunjukkan, Selama periode 1925-1942, Dewan Kabupaten Garut menjadi entitas penting dalam dinamika sosial politik wilayah ini. Lembaga tersebut, yang berada di bawah kendali pemerintah kolonial Belanda, memiliki peran sentral dalam mengatur pemerintahan, memajukan ekonomi, dan mempengaruhi perubahan sosial budaya. Infrastruktur penting seperti jalan raya dan jembatan dibangun melalui program-program inisiatif Dewan. Perubahan sosial budaya di Garut dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pendidikan, budaya, politik, dan agama. Sejumlah faktor memengaruhi dinamika sosial politik Dewan Kabupaten Garut pada periode tersebut dengan kontrol penuh oleh pemerintah Belanda, berbagai agenda dalam sidang umum Dewan membentuk kerangka pengambilan keputusan. Agama juga memainkan peran signifikan dalam politik, dengan evolusi organisasi seperti Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII) dari serikat buruh menjadi organisasi politik dengan unsur nasionalisme religius. Konflik antara kelompok modernis dan tradisional dalam masyarakat Muslim juga memengaruhi dinamika sosial politik. Dampak pasca pembentukan Dewan Kabupaten Garut mencakup sejumlah agenda termasuk anggaran, koperasi pegawai negeri, dan perubahan dalam struktur pemerintahan dan kebijakan publik. Anggaran Dewan Kabupaten pernah ditolak karena kurangnya penghematan, terutama dalam hal dana pegawai. Usaha untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan juga memiliki dampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Meskipun ada perdebatan tentang gaji lurah yang akan dipensiunkan, upaya terus dilakukan untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : *Regentschapsraad, Dinamika Sosial, Politik, Garut, Pribumi*